

BREXIT: Pelajaran bagi ASEAN

Bima Jon Nanda; Inda Mustika Permata

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
FISIP, Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang-Prabumulih, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662 Indonesia
bimajon@gmail.com
Diserahkan: 17 Januari 2017, Diterima: 30 Maret 2017

Abstract

This paper discusses the Brexit phenomenon and lessons can be learned for ASEAN regional cooperation. Brexit or Britain Exit is the phenomenon when Britain ceased being a member of the European Union (EU). The main reason for British escape from the EU through referendum is immigrant issues. Besides, they are not too well informed about the EU and only see the negative impact of the EU on the UK. The conditions faced by the UK are essentially driven by single European market policy. So the flow of capital, goods, services, and workers can move freely in the EU member states. ASEAN has reached the similar level of integration through the AEC in 2015, therefore ASEAN should take lessons from the Brexit phenomenon since the same thing might happen to ASEAN. Knowledge or information of a regional cooperation is important to note for the ASEAN society to create mutual understanding among ASEAN community. Ignorance will result in fear and prejudice against particular policies of a regional cooperation.

Keywords: Brexit, ASEAN, the European Union, integration, immigrant.

Abstrak

Tulisan ini membahas fenomena Brexit dan pelajaran yang bisa diambil oleh kerja sama regional ASEAN. Brexit atau Britain Exit merupakan fenomena keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Isu imigran menjadi alasan utama masyarakat Inggris melakukan referendum untuk keluar dari Uni Eropa. Namun faktanya, warga Inggris sendiri tidak terlalu mengetahui apa itu Uni Eropa dan pendapat masyarakat Inggris justru melihat Uni Eropa membawa dampak negatif pada Inggris. Kondisi yang dihadapi Inggris pada dasarnya dipicu kebijakan single market sehingga arus modal, barang, jasa, dan pekerja dapat dengan bebas bergerak di negara-negara anggota Uni Eropa. ASEAN pada tahun 2015 mencapai tingkat integrasi yang hampir sama melalui ASEAN Economic Community, ASEAN harus dapat mengambil pelajaran dari fenomena Brexit bahwa hal yang sama mungkin terjadi di ASEAN. Pengetahuan atau informasi dari suatu kerja sama regional penting untuk diketahui bagi masyarakat di regional tersebut. Ketidaktahuan akan berakibat pada ketakutan dan prasangka terhadap kebijakan tertentu dari suatu kerja sama regional. ASEAN bisa saja menghadapi hal yang sama melalui AEC, sehingga Brexit memberikan pelajaran dan beberapa catatan bagi kerja sama regional ASEAN, tentang pentingnya pengetahuan terkait ASEAN kepada masyarakat ASEAN itu sendiri. Kata Kunci: Brexit, ASEAN, Uni Eropa, integrasi, imigran.

PENDAHULUAN

Uni Eropa (UE) telah menjadi acuan bagi bentuk regionalisme di berbagai belahan bumi lainnya. Pendapat yang mengatakan UE adalah bentuk regionalisme yang paling sukses dan menjadi contoh bagi regionalisme lainnya tidak sepenuhnya salah. UE menjadi contoh bagi regionalisme lainnya tentu saja karena tidak ada bentuk integrasi di belahan dunia lain yang hampir menyamai tingkat integrasi UE. Dalam tulisan Theodore H. Cohn, ada lima tingkat dalam perkembangan sebuah integrasi kawasan. Dimulai pada tingkat Free Trade Area, Customs Union, Common Market, Economic Union, dan yang terakhir Political Union (Cohn, 2012:209-210).

Dalam integrasi modern, Uni Eropa berada dalam tingkat keempat yaitu Economic Union. Karena Uni Eropa membentuk satu mata uang tunggal bagi anggota-anggotanya. Kesuksesan UE dalam menciptakan mata uang Euro sangat mempengaruhi regionalisme kawasan lain, melihat fakta Euro adalah pesaing utama Dollar AS dalam pasar global. Dalam studi regionalisme, fenomena kerja sama regionalisme yang ditunjukkan oleh Uni Eropa disebut sebagai fenomena spill over. Kerja sama akan semakin meluas, seperti UE yang berawal dari kerja sama perdagangan besi dan batu bara, hingga 'tumpah' menjadi kerja sama zona ekonomi yang mempunyai nilai mata uang

tersendiri. Dalam perkembangannya Uni Eropa menetapkan aturan mengenai pekerja di antara negara-negara anggotanya, sehingga fenomena imigrasi terjadi di negara-negara Uni Eropa yang telah kuat secara ekonomi seperti Inggris.

Namun pada tanggal 23 Juni 2016, Inggris keluar dari Uni Eropa berdasarkan referendum rakyat Inggris. Keluarnya Inggris menandakan bahwa perpecahan dapat saja terjadi, bahkan pada kerja sama regional paling sukses seperti Uni Eropa. Fenomena tersebut tentu saja menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satunya adalah, bagaimana fenomena keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang diistilahkan sebagai Brexit, mempengaruhi kerja sama regional lainnya. Pertanyaan tersebut merupakan tanda tanya besar dalam bentuk kerja sama regional di masa depan. Uni Eropa memberikan fakta bahwa kedalaman integrasi belum tentu menjadi jaminan bahwa negara anggota sebuah kerja sama regionalisme akan terus mempertahankan keanggotaannya. Menariknya, keinginan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa berasal dari desakan masyarakatnya sendiri.

ASEAN merupakan kerja sama regional yang mulai mendekati tingkat integrasi yang hampir sama dengan Uni Eropa. Walaupun belum membuat satu mata uang yang sama, namun melalui AEC, pergerakan barang, dan pekerja negara-negara di ASEAN dapat bergerak dengan bebas di wilayah ASEAN. Brexit, tidak hanya memberikan dampak pada Uni Eropa, namun dapat memberikan pelajaran bagi kerja sama regional lainnya. Perpecahan dalam kerja sama regional tentu merupakan hal yang tidak diinginkan. Terutama apabila kerja sama regional tersebut telah membentuk hubungan ketergantungan di antara negara-negara anggotanya. AEC merupakan langkah awal bagi ASEAN dalam memperdalam integrasinya, ASEAN dapat memperoleh pelajaran dari fenomena Brexit terkait bagaimana mempertahankan integrasi yang telah dibangun melalui kerja sama regional.

Tulisan ini berupaya untuk mendeskripsikan fenomena keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dapat menjadi 'peringatan' dan pelajaran bagi ASEAN, meskipun ASEAN mempunyai model yang berbeda dalam penerapannya dengan Uni Eropa. Beberapa hal yang paling jelas adalah ASEAN menggunakan sistem konsensus dan tidak adanya

dasar non-intervensi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Uni Eropa merupakan inspirasi kesuksesan kerja sama regional bagi ASEAN. Kesuksesan Uni Eropa ini sebelumnya diawali dari European Community (EC).

PEMBAHASAN

UNI EROPA SEBAGAI MODEL KERJA SAMA REGIONAL

EC merupakan peleburan tiga organisasi pemerintahan yang masih berada dalam satu institusi. Ketiga organisasi tersebut adalah, European Coal and Steel Community (ECSC), European Atomic Energy Community (Euratom), European Economic Community (EEC). EEC kemudian dinamai kembali menjadi EC pada tahun 1993 melalui Traktat Maastricht.

EC berawal dari usaha Jean Monnet dan menteri luar negeri Robert Schuman yang ingin membangun perdamaian dan menyatukan Eropa melalui integrasi ekonomi. Integrasi tersebut dilakukan dengan cara ekonomi namun tujuannya tetap politik (Burgess, 1996:1). Mengutip pernyataan presiden pertama European Commission Walter Hallstein kerja sama antara negara-negara Eropa tidak hanya seputar integrasi ekonomi, namun juga integrasi politik (Burgess, 1996:1). Konsep Monnet atas integrasi Eropa dapat dikatakan sukses. Pada tahun 1992 Single European Market (SEM) diluncurkan, menandakan kerja sama Eropa terintegrasi semakin dalam. Metode integrasi Monnet menggunakan pendekatan ekonomi dalam menciptakan integrasi. Kerja sama ekonomi antara negara-negara di Eropa akan mendorong kerja sama di bidang lain dan menciptakan institusi yang lebih kuat. Model tersebut terbukti dengan terbentuknya EC dan terciptanya mata uang Euro sebagai mata uang tunggal EC. Kerja sama regional yang berlandaskan kerja sama ekonomi, adalah kerja sama regional yang berawal dari Eropa, dan telah menjadi desain utama dari kerja sama regional lainnya. Sesuai dengan konsep integrasi Monnet, kerja sama ekonomi hanyalah cara untuk mencapai tujuan politik. ECSC pertama kali dibentuk untuk mengikat Jerman secara ekonomi. Perdamaian tercipta apabila aktor-aktor yang berada di dalam satu kawasan mempunyai tingkat ketergantungan antara satu dengan lainnya.

EC merupakan kerja sama regional yang mempunyai regulasi dan institusi yang kuat. Single European Market

(SEM) di mana salah satu tujuan dibentuknya adalah memperkuat kohesi ekonomi, dan menyelaraskan kerja sama kebijakan luar negeri melalui kegiatan-kegiatan European Parliament, Commissions, dan pertemuan para menteri. Hasil dari perjanjian ini adalah melembagakan pertemuan reguler antara kepala negara dan pemerintahan negara anggota. Paling tidak acara ini diadakan setahun dua kali dan dihadiri oleh presiden komisi Eropa (Perwita dan MochamadYani, 2005:143). Traktat Maastricht pada tahun 1993 menjadi langkah besar dalam terwujudnya kerja sama regional Eropa yang terinstitusionalisasi. Traktat tersebut melahirkan tiga pilar utama yang menyokong kerja sama Uni Eropa. Ketiga pilar tersebut adalah (Perwita dan Mochamadyani, 2005) pilar ekonomi yaitu pasar tunggal Eropa menuju Kesatuan Ekonomi dan Moneter (Economic and Monetary Union/EMU), kemudian pilar politik yang berdasarkan pada kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (Common Foreign and Security Policy/CFSP), serta pilar sosial-hukum yang menyangkut peradilan dan masalah dalam negeri (Justice and Home Affairs/JHA).

Perjanjian Maastricht juga memulai proses transformasi UE menjadi sebuah kesatuan ekonomi dan moneter tunggal dengan menghubungkan mata uang nasional negara-negara anggota dan menuntut komitmen anggota-anggotanya untuk menciptakan satu mata uang Eropa. Pada tahun 2000 diperkenalkan zona euro, yaitu penggantian mata uang-mata uang nasional dengan satu mata uang yang disebut Euro dan pembentukan Bank Sentral Eropa (European Central Bank) yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter untuk Eropa secara keseluruhan. Pada tahun 2004, Euro telah menjadi mata uang yang kuat dan menjadi pesaing Dollar AS dalam transaksi internasional.

Uni Eropa adalah regionalisme yang memberikan pengaruh atas terbentuknya bentuk regionalisme lain di dunia. Terutama pada negara-negara selatan yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya. Negara-negara selatan adalah negara-negara yang baru terlahir setelah lepas dari penjajahan. Negara seperti Malaysia dan Indonesia adalah negara yang masih sangat muda dan sangat rentan terhadap berbagai ancaman. Mulai dari ancaman keamanan serta ketidakmampuan negara dalam mengembangkan ekonomi pasca kemerdekaan. Negara-negara tersebut menjadikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sebagai

kepentingan utama.

Hanya beberapa bulan setelah ditanda tangannya Treaty of Rome, lima negara yang berada di wilayah Amerika Tengah segera mendiskusikan proposal yang bertujuan untuk membentuk kerja sama regional yang berambisi menjadi unifikasi politik di antara negara-negara tersebut. Kerja sama tersebut sangat dipengaruhi model kerja sama Uni Eropa yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan negara-negara anggota Uni Eropa (Feder, 1961:433). Proposal yang diajukan oleh lima negara Andean tersebut melahirkan LAFTA pada tahun 1960. Namun kerja sama yang berjalan stagnan membuat lima negara Andean tersebut membentuk Andean Common Market pada tahun 1969, di mana sangat banyak kriteria kerja sama yang ditiru dari Uni Eropa. Seperti harmonisasi kebijakan, dan pengurangan tarif. Berbeda dengan negara-negara di Amerika Tengah yang membentuk kerja sama regional karena terinspirasi dari peningkatan kesejahteraan dari regionalisme, Mercusor terbentuk justru dengan alasan yang berbeda. Mercusor merupakan kerja sama regional yang diawali oleh kerja sama Argentina dan Brazil. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mengurangi rivalitas dan persaingan mereka saat masih di bawah pemerintahan diktator.

Sedangkan di wilayah Asia, ASEAN sebagai kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara pada awalnya dibentuk untuk membendung pengaruh paham komunis pada masa Perang Dingin (Chia, 1997:276). Walaupun terinspirasi dari model kerja sama Uni Eropa, ASEAN tidak menggunakan pendekatan kerja sama yang dimiliki oleh Uni Eropa. Hal ini disebabkan negara-negara anggota yang mempermasalahkan isu kedaulatan apabila menggunakan pendekatan kerja sama Uni Eropa yang sangat terinstitusionalisasi, mempunyai interdependensi yang tinggi antara negara-negara anggotanya, dan mempunyai regulasi yang kuat. Kerja sama regional ASEAN dinamakan sebagai 'jalan ASEAN', sebuah kerja sama regional yang mengedepankan non-interferensi antar negara-negara anggota, dan perangkat institusional yang lemah (Leifer, 1989:8-9). Menurut analisis Norman Palmer terhadap regionalisme di Asia-Pasifik, ASEAN merupakan regionalisme yang dikategorikan sebagai 'gelombang baru' regionalisme. Berbeda dengan regionalisme 'tua' yang mengarah pada

integrasi dan federalisme, regionalisme baru cenderung mengedepankan interdependensi antar negara-negara anggotanya (Palmujoki, 1997:270). Setelah ditandatanganinya Traktat Maastricht, integrasi dalam Uni Eropa menguat baik secara vertikal maupun horizontal. Menandai menguatnya interdependensi antara negara-negara Uni Eropa, karena institusi yang semakin terintegrasi. Interdependensi merupakan dasar dari kerja sama ASEAN (Palmujoki, 1997:270).

Uni Eropa dapat disimpulkan sebagai kerja sama yang menginspirasi, menjadi model, dan acuan bagi kerja sama regional lainnya. Walaupun bentuk kerja sama tersebut tidak sepenuhnya meniru bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa mempunyai regulasi yang sangat kuat, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara Eropa. Sedangkan kerja sama regional seperti Mercusur justru menjadikan regionalisme sebagai pendekatan dengan negara-negara lain yang mempunyai rasa enmity yang kuat, seperti Brazil dan Argentina yang menggunakan kerja sama regional untuk mendorong proses demokrasi di kedua negara tersebut.

Pembentukan regionalisme akan selalu didasari oleh kepentingan suatu negara. Kepentingan dalam setiap negara berbeda, dan dipengaruhi oleh aktor utama yang paling berpengaruh atau memberikan pengaruh dalam negara tersebut. Seperti individu paling berpengaruh (kepala pemerintahan), perusahaan, serikat buruh, kelompok kepentingan, dan aktor-aktor berpengaruh lainnya. Ideologi juga akan mempengaruhi kepentingan dari negara tersebut. Dalam ekonomi global, kepentingan adalah suatu tujuan yang nantinya melalui institusi akan merubahnya menjadi kebijakan. Terbentuknya regionalisme tidak akan lepas dari kepentingan, seperti salah satu tujuan utama dari terbentuknya regionalisme adalah pemenuhan kepentingan masing-masing negara dalam menghilangkan tarif atas produk-produk yang mereka hasilkan. Motif dari setiap negara dalam membentuk atau bergabung ke dalam regionalisme akan selalu berbeda-beda. Dilihat dalam latar sejarah, pada abad ke-17 sudah banyak bentuk regionalisme yang melibatkan koloni, provinsi, dan negara, dan beberapa perjanjian menghasilkan kerja sama politik dan ekonomi.

John Ravenhill menjelaskan latar belakang sebuah pemerintahan bergabung menjadi anggota regionalisme

karena dua alasan, politik atau ekonomi. Dalam hal politik alasan-alasan pendorongnya adalah: perubahan keamanan, meningkatkan posisi tawar-menawar suatu negara di dunia internasional, memberikan sinyal kepada investor potensial. Sedangkan alasan ekonomi didorong oleh beberapa hal seperti: membuka akses pasar yang lebih besar, kemungkinan untuk meningkatkan FDI, kemungkinan untuk melakukan 'integrasi yang lebih dalam'. Ravenhill menjelaskan lebih lanjut bahwa regionalisme akan menarik investor-investor potensial. Contohnya dapat dilihat di regionalisme NAFTA saat Meksiko bergabung pada tahun 1994. FDI di Meksiko rata-rata sebesar 8 Milyar Dollar AS pada tahun 1990-1995 meningkat menjadi 14 Milyar Dollar AS dan 24 Milyar Dollar AS pada tahun 2001. Pemerintah juga menggunakan regionalisme sebagai 'stepping stone' terhadap liberalisme global, karena ada beberapa sektor yang tidak akan bertahan dalam kompetisi global, namun regionalisme akan membentuk kesiapan sektor tersebut nantinya. Contohnya regionalisme membuka pasar yang lebih besar di kawasan untuk perusahaan, asosiasi ataupun petani yang akan membuka pasar atas produk-produk mereka. Tapi produk-produk tersebut belum dapat bersaing secara kompetitif di pasar global namun dapat bersaing pada pasar kawasan.

Sedangkan dalam latar belakang politik Ravenhill menjelaskan bahwa regionalisme terbentuk untuk menghilangkan kemungkinan perang yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Contoh terbesar dapat dilihat pada pembentukan ECSC atau pada pembentukan ASEAN pada tahun 1960an dengan tujuan membangun kepercayaan antar sesama negara di wilayah Asia Tenggara, untuk menghindari konflik bersenjata pada era Perang Dingin. Dalam beberapa kasus regionalisme ekonomi digagas untuk meningkatkan keamanan terhadap anggotanya karena adanya ancaman dari luar oleh negara non-anggota. Southern African Development Coordination Conference (SADCC) dibentuk pada tahun 1980 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Afrika Selatan pada era apartheid.

ASEAN mempunyai cerita yang berbeda, dibentuk sebagai kerja sama yang bertujuan melawan ancaman yang datang dari 'luar'. Namun dalam perkembangannya, ASEAN mulai meniru struktur kerja sama Uni Eropa. Pada KTT

ASEAN ke-9 tahun 2003 disepakati wacana pembentukan ASEAN Community. Pada perkembangannya ASEAN Community dibentuk pada tahun 2015. AC dibentuk atas tiga pilar, yakni ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Asia-Cultural Community, ASEAN Political-Security Community (Nuraeni S, et.al, 2010:233). AEC mempunyai empat pilar, yakni pasar tunggal ASEAN, pengembangan ekonomi di ASEAN, pemerataan ekonomi, dan peningkatan daya saing global.

FENOMENA BREXIT

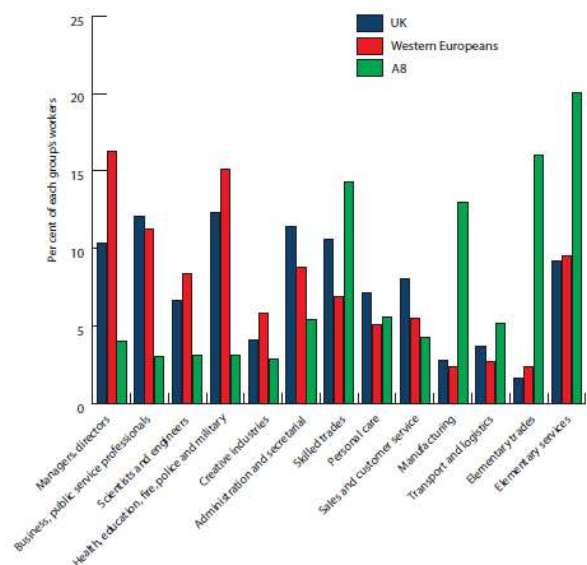
Belum lama ini dunia dikejutkan dengan keputusan Inggris yang pada akhirnya memutuskan melepaskan diri dari naungan Uni Eropa. Walaupun sebenarnya isu mengenai pelepasan diri Inggris dari Uni Eropa ini telah lama berhembus. David Cameron, Perdana Menteri Inggris, bahkan berjanji akan lengser dari kepemimpinannya apabila Inggris tidak dapat mempertahankan status keanggotaannya dengan Uni Eropa. Peristiwa ini kemudian menjadi suatu fenomena baru yang menimbulkan sebuah pertanyaan akankah Uni Eropa masih dapat dikategorikan sebagai suatu contoh integrasi yang sukses pasca fenomena Brexit.

Sebelumnya, Uni Eropa merupakan suatu kerja sama regional yang paling sukses dalam hubungan internasional. Uni Eropa menjadi kiblat bagi kerja sama regional lain yang terbentuk di wilayah lain. Bila ditinjau, Uni Eropa dapat dikategorikan sebagai organisasi regional yang sempurna apabila dapat memenuhi satu fase akhir yakni terintegrasi dalam bidang politik. Tahapan ini dapat ditempuh setelah suatu organisasi regional telah berhasil menciptakan suatu integrasi dalam bidang ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Cohn. Dapat diketahui bahwa Uni Eropa telah sukses mengaplikasikan hal ini, terbukti dengan bebasnya alur barang, jasa, dan manusia melintasi teritorial negara-negara yang telah tergabung dalam Zona Uni Eropa. Kemudian adanya mata uang bersama yaitu Euro juga merupakan suatu keberhasilan negara-negara Uni Eropa dalam suatu upaya untuk menghilangkan kesenjangan akibat perbedaan nilai tukar mata uang. Meskipun demikian, Inggris tetap mempertahankan dan menggunakan mata uangnya sendiri, yakni poundsterling. Alasannya adalah nilai tukar mata uang Inggris ini

merupakan yang paling tinggi dari negara-negara lain di dunia.

Seperti dua sisi mata uang, bergabungnya Inggris sebagai anggota Uni Eropa tentunya memberikan keuntungan sekaligus adanya efek negatif yang dirasakan oleh Inggris. Keuntungan bergabung dalam Uni Eropa bagi Inggris misalnya adalah rendahnya halangan perdagangan bagi Inggris. UE adalah pasar yang potensial bagi komoditas yang Inggris hasilkan.

Gambar 1. Grafik Penyerapan Tenaga Kerja di Inggris



Sumber: (Springford et al., 2014:71)

Brexit terjadi berdasarkan hasil voting masyarakat Inggris terkait masa depan Inggris tersebut. Polling tersebut menunjukkan bahwa 51,9% warga Inggris menginginkan Inggris untuk melepaskan keanggotaannya dengan Uni Eropa. Voting ini diikuti oleh lebih dari 30 juta warga Inggris (BBC, 2016). Hasil ini muncul karena berbagai faktor di antaranya banyaknya imigran yang berasal dari negara-negara yang masuk dalam zona Eropa untuk mencari kerja di Inggris. Setelah diberlakukannya kebijakan pasar tunggal Eropa, barang, jasa, dan pekerja dapat bergerak dengan bebas di semua negara-negara anggota Uni Eropa. Kekhawatiran muncul dari masyarakat Inggris yang melihat arus pekerja yang berasal dari negara-negara anggota UE lainnya, dapat mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga Inggris. Pada tahun 2004 saja sekitar 1,1 juta warga UE bermigrasi ke Inggris, 660.000

di antaranya kemudian menjadi pekerja di Inggris (Springford et.al., 2014:68). Migrasi yang terjadi tidak hanya membawa pekerja dengan kemampuan low skill namun juga pekerja yang mempunyai pendidikan tinggi. Berikut adalah grafik penyerapan tenaga kerja di Inggris.

Dari grafik di atas, bagian kiri merupakan sektor pekerjaan dengan bayaran tinggi dan membutuhkan kemampuan spesifik. Berdasarkan grafik di atas, imigran yang berasal dari negara-negara Eropa Barat mendominasi sektor pekerjaan dengan bayaran tinggi seperti manajer, insinyur dan peneliti. Sedangkan warga yang berasal dari negara A8 (negara-negara yang bergabung ke UE pada tahun 2004) mendominasi sektor pekerjaan dengan upah yang tidak terlalu tinggi dan sektor pekerjaan seperti buruh pabrik dan pekerja bangunan. Walaupun dalam laporan CER fenomena tersebut justru memberikan dampak positif bagi warga Inggris sendiri (seperti meningkatnya upah minimum), namun warga Inggris melihat fenomena tersebut dalam satu perspektif, bahwa semakin banyak imigran yang masuk ke Inggris, persaingan semakin ketat, dan berakibat pada meningkatnya pengangguran bagi warga Inggris sendiri. Wacana Uni Eropa tidak sepenuhnya dikenal dan dipahami oleh masyarakat Inggris sehingga mereka tidak memahami bagaimana peran Uni Eropa di dalam kehidupan mereka. Kondisi ini menyebabkan Uni Eropa tidak berfungsi secara signifikan bagi Inggris. Maka dari itu, sangat mudah bagi masyarakat Inggris untuk memilih melepaskan diri dari Uni Eropa.

PELAJARAN FENOMENA BREXIT BAGI ASEAN

Setelah dipaparkan mengenai fenomena Brexit, maka bagian ini akan memaparkan tentang implikasi fenomena tersebut terhadap ASEAN. Telah dijelaskan pula sebelumnya bahwa Uni Eropa telah menjadi model kerja sama di level regional bagi regional lainnya, termasuk pada ASEAN. Mapannya kerja sama Uni Eropa ini telah mendorong ASEAN untuk melangkah maju dan mengembangkan kerja sama tersebut ke dalam berbagai aspek. Salah satunya seperti pengembangan integrasi ekonomi yang lebih luas, seperti halnya Uni Eropa, ASEAN pun telah menerapkan ASEAN Economic Community (AEC) setahun lalu. AEC tidak hanya memungkinkan perpindahan barang secara bebas tapi juga manusia yang

berada di dalam wilayah kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Tidak hanya itu, sebelumnya ASEAN juga sempat mewacanakan untuk dibentuknya suatu mata uang tunggal untuk negara-negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah negara-negara melakukan aktivitas perdagangan yang dapat mengurangi hambatan perdagangan. Namun, adanya permasalahan keuangan yang terjadi di Yunani menimbulkan suatu efek domino terhadap keuangan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa akibat adanya satu mata uang tunggal yang diterapkan. Peristiwa ini kemudian menjadi suatu rambu-rambu bagi ASEAN untuk meninjau kembali terkait wacana pembentukan mata uang tunggal di negara-negara ASEAN.

Sedikit peristiwa tersebut menyiratkan bahwa yang terjadi di Uni Eropa selalu menjadi perhatian bagi kerja sama regional lainnya, khususnya ASEAN. Fenomena Brexit pun menjadi perhatian tidak hanya bagi organisasi regional, melainkan juga masyarakat seluruh dunia. Peristiwa ini sangat tentu sebagai suatu anomali, di mana perluasan Uni Eropa masih tetap terjadi, tapi Inggris malah memutuskan untuk melepaskan keanggotaannya dari Uni Eropa. Secara tidak langsung, fenomena ini tidak akan mempengaruhi ASEAN secara signifikan, namun hal ini menjadi pengingat bagi ASEAN bahwa negara akan melakukan berbagai cara dan dapat mengorbankan suatu hal untuk mencapai kepentingan nasionalnya serta rentannya kerja sama regional karena hal ini.

Ketika Inggris memutuskan bergabung dengan Uni Eropa, maka Inggris harus mengorbankan kedaulatannya untuk bersedia berbagi dengan negara anggota lainnya, namun bersamaan dengan itu, Inggris mendapatkan keuntungan dari segi perdagangan, di mana Inggris dikenai pajak yang murah dalam melakukan aktivitas ekspor ke negara Uni Eropa lainnya. Pasca Brexit, ada efek positif dan negatif yang dirasakan oleh Inggris, yakni Inggris mendapatkan kembali kedaulatannya secara utuh, namun Inggris harus melakukan negosiasi ulang dalam hal perdagangan. Kondisi-kondisi seperti inilah yang harus diperhatikan oleh ASEAN bahwa negara-negara ASEAN memang harus mempunyai suatu ide dan tujuan bersama yang merupakan suatu perekat antar satu-sama lain di dalam ASEAN. Terlebih dengan tidak meratanya

pertumbuhan ekonomi serta kestabilan politik dan sosial di wilayah ASEAN dapat menjadi suatu faktor yang dapat menimbulkan keretakan di dalam kerja sama regional ini. Mengingat ASEAN memiliki mekanisme yang tidak sekokoh Uni Eropa, menjadikan ASEAN lebih rentan terhadap terjadinya permasalahan, dan pengelolaan permasalahan pun hanya melalui musyawarah yang tentunya akan memakan waktu lama dalam berupaya menangani persoalan yang muncul.

Meskipun fenomena Brexit ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi ASEAN, namun ASEAN tetap perlu menjadikan fenomena ini sebagai suatu kajian yang perlu untuk dipahami demi keberlangsungan dan keutuhan ASEAN. Kemampuan ASEAN untuk bertahan tentunya memerlukan dukungan tidak hanya pemerintahan negara-negara di ASEAN, tapi juga masyarakat yang berada di lingkungan negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu, sangat penting negara-negara ASEAN untuk menyebarkan ide-ide mengenai ASEAN ke seluruh kalangan di masyarakat ASEAN, tujuannya adalah agar masyarakat merasa bahwa kehadiran ASEAN ini sangat penting dan dirasakan di setiap lini kehidupan masyarakat. Belajar dari Brexit bahwa sebagian besar penduduk Inggris tidak memahami bagaimana Uni Eropa dapat berperan signifikan dalam kehidupan mereka. Kurang berhasilnya peran pemerintah dalam menyebarkan ide dan wacana ke seluruh negeri mengakibatkan masyarakat menjadi kurang peduli mengenai Uni Eropa ini.

ISU IMIGRAN SEBAGAI SALAH SATU PEMICU FENOMENA BREXIT

Keinginan masyarakat Inggris untuk keluar dari zona Eropa, merupakan alasan utama Brexit terjadi. Isu imigran yang masuk ke Inggris menjadi alasan utama, sesuai dengan polling yang dilakukan oleh media Inggris, Guardian, pada Maret 2016. Dalam polling tersebut terdapat tiga permasalahan paling penting yang berpengaruh di Inggris di antaranya permasalahan imigrasi, kesehatan, kemudian keanggotaan Inggris dan hubungannya dengan Uni Eropa (Mann, 2016). Polling tersebut mencerminkan bahwa warga Inggris mengidentifikasi isu imigran sebagai permasalahan yang paling mempengaruhi Inggris. Permasalahan keanggotaan Inggris di UE menjadi isu paling penting

setelah isu imigran dan kesehatan.

ASEAN yang telah meresmikan AEC pada tahun 2015 akan menciptakan pergerakan arus jasa dan pekerja di antara negara-negara ASEAN, sehingga fenomena imigrasi akan terjadi dari negara dengan ekonomi lemah ke negara dengan ekonomi yang lebih kuat. Seperti yang dihadapi Inggris, negara-negara ASEAN sangat mungkin akan menghadapi isu yang sama. Kekhawatiran muncul bukan dari aspek pemerintah namun berasal dari masyarakat. Masyarakat akan menghadapi kekhawatiran atas pergerakan imigran yang disinyalir akan mengambil lahan pekerjaan di negara-negara tempat mereka bermigrasi. Seperti halnya Inggris, ASEAN harus dapat mengambil pelajaran bahwa masyarakat ASEAN mungkin masih gamang terhadap pergerakan imigran yang bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. Seperti masyarakat Inggris yang menyatakan imigran sebagai isu utama permasalahan dan alasan yang mempengaruhi voting mereka terkait Brexit.

PENTINGNYA PENGETAHUAN TENTANG REGIONALISME BAGI MASYARAKAT ASEAN

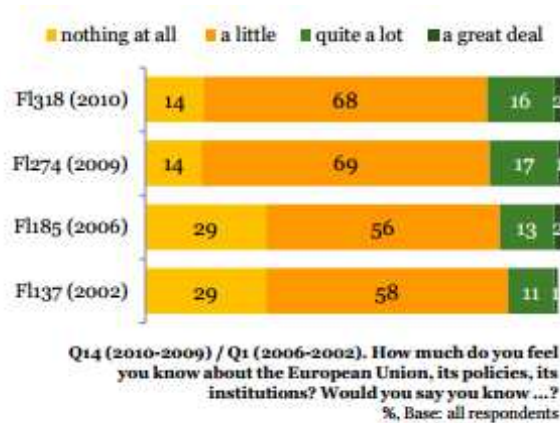
Berdasarkan empat pilar AEC, ASEAN jelas semakin meniru model integrasi Monnet, layaknya model integrasi Uni Eropa. Mengedepankan kerja sama ekonomi. Model keempat pilar tersebut dapat dilihat dalam gambar 2.

Gambar 2. Empat Pilar ASEAN Economic Community 2015

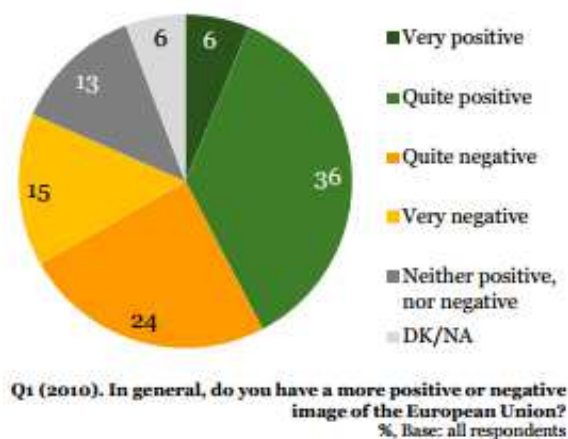


Sumber: (Sekretariat ASEAN, 2015)

Gambar 3. Persentase Pengetahuan tentang Uni Eropa, kebijakannya, dan institusi



Gambar 4. Tanggapan mengenai Uni Eropa



Sumber: (Gallup Organisation, 2011:6)

Salah satu pilar pertama mempunyai tujuan untuk menciptakan pasar tunggal di ASEAN melalui pergerakan barang, investasi, jasa, dan pekerja secara bebas di dalam negara-negara ASEAN. ASEAN harus dapat mengambil tindakan preventif agar isu yang dihadapi UE tidak terjadi di ASEAN. Kepemerintahan ASEAN harus mampu menanggulangi persepsi masyarakat yang merasa 'tidak aman' atas pergerakan imigran yang bebas di negara-negara ASEAN. Brexit terjadi karena adanya referendum dari masyarakat Inggris, agar Inggris keluar dari zona UE. Namun faktanya, masyarakat Inggris tidak terlalu tahu informasi, regulasi, serta peraturan yang dibuat oleh UE. Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Gallup Orga-

nization di bawah permintaan komisi Eropa, hanya 18% koresponden yang cukup mengetahui tentang UE, 82% lainnya mempunyai pengetahuan yang sedikit bahkan tidak tahu sama sekali (Gallup Organization, 2011:5). Besarnya ketidaktahuan warga Inggris terhadap UE sejalan dengan persepsi masyarakat Inggris atas UE. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 3 dan 4.

Berdasarkan grafik, kurang dari 20% koresponden yang merasa cukup mengetahui tentang UE, dan sekitar 39% koresponden merasa keanggotaan Inggris di UE membawa dampak negatif. Kurangnya informasi masyarakat Inggris terhadap UE mempengaruhi opini mereka atas UE. ASEAN harus dapat menjadikan fenomena tersebut sebagai acuan dalam mengembangkan kerja sama regionalnya. Langkah utama ASEAN dalam menanggapi isu Brexit adalah memberikan informasi yang jelas apa itu ASEAN kepada masyarakat ASEAN.

Brexit memberikan pelajaran bahwa integrasi yang semakin dalam belum tentu membawa pengaruh positif dalam kacamata masyarakat. Masyarakat cenderung melihat sisi-sisi yang cenderung asing dan dianggap membahayakan mereka. Dalam kasus Brexit hal tersebut adalah isu imigran. ASEAN mempunyai kemungkinan menghadapi isu yang sama, namun ASEAN dapat menanggulangi hal tersebut dengan memberikan informasi terkait ASEAN dan pilar-pilar kerja sama kepada masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Hal ini penting mengingat belum meratanya kesadaran masyarakat negara-negara anggota terhadap ASEAN seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Persentase Familiarnya 10 Negara terhadap ASEAN

	In general, how familiar are you with ASEAN? (%)					
	Very Familiar	Somewhat Familiar	A Little Familiar	Not at All Familiar	Very or Somewhat	Little or Not at All
Brunei	1.0	52.8	46.1	.0	53.8	46.1
Cambodia	2.3	56.5	40.3	.9	58.8	41.2
Indonesia	5.0	63.3	31.2	.5	68.3	31.7
Laos	13.0	71.5	15.0	.5	84.5	15.5
Malaysia	6.6	59.3	32.8	1.2	65.9	34.0
Myanmar	2.1	7.5	48.1	42.2	9.6	90.3
Philippines	6.4	53.2	36.8	3.6	59.6	40.1
Singapore	2.6	47.7	42.5	7.1	50.3	49.7
Thailand	8.0	60.0	30.0	2.0	68.0	32.0
Vietnam	43.8	44.8	10.8	.5	88.6	11.3
Total	9.1	51.7	33.7	5.9	60.7	39.2

Sumber: (Thompson & Thianthai)

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa bila dilihat secara keseluruhan, masyarakat di negara-negara ASEAN 60,7% telah familiar dengan ASEAN. Vietnam dan Laos merupakan dua negara teratas yang persentasenya tinggi dalam hal pengenalan terhadap ASEAN. Singapura justru mempunyai persentase lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam dan Laos. Tabel ini memperlihatkan perlunya sosialisasi informasi terkait ASEAN agar tidak adanya kesenjangan pengetahuan di antara negara-negara di ASEAN. Sebab adanya pengetahuan yang baik akan menunjang pelaksanaan setiap program ASEAN di negara-negara anggota dengan lancar.

Tabel 2. Persentase Rasa Bagian dari ASEAN

I feel that I am a citizen of ASEAN. (%)

	Strongly Agree	Somewhat Agree	Somewhat Disagree	Strongly Disagree	Total Agree	Total Disagree
Brunei	26.4%	55.8%	13.7%	4.1%	82.2%	17.8%
Cambodia	66.4%	26.3%	6.9%	.5%	92.7%	7.4%
Indonesia	22.5%	50.5%	18.8%	8.3%	73.0%	27.1%
Laos	48.5%	47.5%	4.0%	0%	96.0%	4.0%
Malaysia	36.0%	50.8%	11.6%	1.7%	86.8%	13.3%
Myanmar	28.0%	31.5%	11.0%	29.5%	59.5%	40.5%
Philippines	19.1%	50.5%	25.9%	4.5%	69.6%	30.4%
Singapore	8.1%	41.2%	36.0%	14.7%	49.3%	50.7%
Thailand	19.5%	47.5%	23.5%	9.5%	67.0%	33.0%
Vietnam	45.1%	46.6%	6.4%	2.0%	91.7%	8.4%
Average	32.0%	44.8%	15.8%	7.5%	76.8%	23.3%

Sumber: (Thompson & Thianthai, hal. 53)

Tabel 3. Persentase Keterkaitan Keanggotaan ASEAN terhadap Individu Warga Negara

My country's membership in ASEAN is beneficial to me personally. (%)

	Strongly Agree	Somewhat Agree	Somewhat Disagree	Strongly Disagree	Total Agree	Total Disagree
Brunei	11.2	61.4	23.4	4.1	72.6	27.5
Cambodia	27.2	52.1	16.1	4.6	79.3	20.7
Indonesia	7.8	40.8	39.0	12.4	48.6	51.4
Laos	31.5	61.0	6.5	1.0	92.5	7.5
Malaysia	12.9	53.5	28.2	5.4	66.4	33.6
Myanmar	5.5	20.5	15.0	59.0	26.0	74.0
Philippines	9.1	58.2	27.3	5.5	67.3	32.8
Singapore	5.9	60.4	27.4	6.3	66.3	33.7
Thailand	20.5	54.0	23.5	2.0	74.5	25.5
Vietnam	56.4	37.7	3.4	2.5	94.1	5.9
Average	18.8	50.0	21.0	10.3	68.8	31.3

Sumber: (Thompson & Thianthai, hal. 45)

Tabel ini menunjukkan persentase bagaimana masyarakat negara-negara anggota ASEAN merasa menjadi bagian dari ASEAN. Hampir sama dengan tabel sebelumnya, di mana Singapura menjadi negara yang pal-

ing rendah rasa menjadi bagian dari masyarakat ASEAN. Namun Laos, Kamboja, dan Vietnam merupakan tiga negara yang persentasenya tertinggi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya terhadap rasa menjadi bagian dari masyarakat ASEAN. Meskipun secara keseluruhan persentase rata-rata terhadap pernyataan tersebut sangat tinggi. Penilaian ini memperlihatkan bahwa sense of awareness masyarakat dari tiga negara, khususnya Laos dan Vietnam sangatlah tinggi terhadap ASEAN.

Tabel ini menunjukkan bahwa Myanmar dan Indonesia merupakan negara dengan persentase paling rendah yang merasa bahwa ASEAN memberikan keuntungan secara personal kepada masyarakatnya. Sementara Laos dan Vietnam tetap menduduki persentase tertinggi dalam hal ini. Tabel ini memperlihatkan bahwa memang ASEAN harus mewacanakan setiap programnya lebih luas dan bagaimana program-program tersebut dapat memberikan keuntungan secara personal terhadap kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN.

Di samping itu, longgarnya mekanisme dan peraturan ASEAN juga menjadi peluang bagi negara-negara untuk mangkir dari setiap kesepakatan yang terbentuk. Hal ini misalnya terkait ASEAN Economic Community, ASEAN perlu mengatur tentang perpindahan manusia maupun jasa secara jelas. Apabila ASEAN tidak mampu memberikan pengaturan yang jelas akan merugikan negara-negara ASEAN itu sendiri. Tidak tertutup kemungkinan jika fenomena seperti Brexit dapat terjadi di ASEAN.

KESIMPULAN

Uni Eropa merupakan model kerja sama regional yang memberikan inspirasi bagi kerja sama di regional lainnya. Hal ini disebabkan karena keberhasilan Uni Eropa dalam melakukan perluasan keanggotaan. Namun fenomena Brexit baru-baru ini menimbulkan suatu kekhawatiran baru terhadap suatu kerja sama regional. Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa tentunya mempengaruhi arsitektur dari Uni Eropa. Inggris harus kembali menegosiasikan setiap aspek yang sudah disepakati ketika Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Namun fenomena ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi kerja sama regional lainnya, khususnya ASEAN. Meskipun demikian, fenomena ini menjadi rambu-rambu dan suatu

pelajaran yang berharga bagi ASEAN, agar peristiwa keluarnya keanggotaan di suatu organisasi regional dapat dibendung sehingga tidak terjadi.

REFERENSI

- BBC, 2016, EU Referendum, (Online), (http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results, 30 Agustus 2016).
- Burgess, M., 1996, Introduction: Federalism and Building the European Union, *Publius*, Autumn, Vol. 26, No. 4.
- Cohn, T. H., 2012, *Global Political Economy: 6th Ed*, New York: Pearson.
- Feder, E., 1961, Some Reflections on Latin America's 'Common Market'. *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 20, No.4.
- Gallup Organization, 2011, Attitudes toward the EU in the United Kingdom, *Flash Euro Barometer*, (Online), (http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_318_en.pdf, diakses 29 Agustus 2016).
- Leifer, M., 1989, *ASEAN and the Security of South-East Asia*, New York: Routledge.
- Mann, J., 2016, Britons and Europe: the Survey Result, (Online), (<http://www.theguardian.com/politics/2016/mar/20/britons-on-europe-survey-results-opinium-poll-referendum>, diakses 30 Agustus 2016).
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M., 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sekretariat ASEAN, 2015, *ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements*, Jakarta: ASEAN, (Online) (<http://www.asean.org/storage/images/2015/November/aec-page/AEC-2015-Progress-and-Key-Achievements.pdf>, diakses 29 Agustus 2016).
- Springford, J., Tilford, S., Whyte, P., 2014, *The Economic Consequences of Leaving the EU*, A Center of European Reform, (Online), (https://www.cer.org.uk/sites/default/files/smc_final_report_june2014.pdf, diakses 28 Agustus 2016).
- Sudirman, A., Silva, D., Suparman, N., 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thompson, E. C., & Thianthai, C., (t.thn.), *Attitude and Awareness toward ASEAN: findings of a Ten Nations Survey*, ASEAN Foundation, (Online), (<http://www.aseanfoundation.org/documents/Attitudes%20and%20Awareness%20Toward%20ASEAN.pdf>, diakses 29 Agustus 2016).
- Yue., C. S., 1997. *Regionalism and Subregionalism in ASEAN: The Free Trade Area and Growth Triangle Models*. Dalam Ito, T., & Krueger, A. (Eds.), *Regionalism versus Multilateral Trade Arrangements*, London: Chicago University Press.